

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PERIZINAN BAGI USAHA UMKM (USAHA  
MENENGAH KECIL MIKRO) BERDASARKAN PERATURAN  
DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG  
PELAKSANAAN PERIZINAN DI  
KABUPATEN PELALAWAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH :**

**NOLA ARULIA ANGRIANI**

**NIM. 11727201977**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU**

**1443 H/2021 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul ***“Pelaksanaan Perizinan Bagi Usaha UMKM (usaha menengah kecil mikro) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Perizinan Di Kabupaten Pelalawan”*** yang ditulis oleh:

Nama : Nola Arulia Angriani

NIM : 11727201977

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 Oktober 2021

Pembimbing Skripsi

  
**Muslim, S.Ag.,SH.,M.Hum**  
NIP. 197205052014111002

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul *"PELAKSANAAN PERIZINAN BAGI USAHA UMKM (usaha menengah kecil mikro) BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI KABUPATEN PELALAWAN"* yang ditulis oleh :

Nama : **NOLA ARULIA ANGRIANI**  
 NIM : 11727201977  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 22 November 2021  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Gedung Belajar Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 November 2021 M

**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
**ASRIL,S.H.I.,M.H**

Sekretaris  
**MUSLIM,S.Ag.,SH.,M.Hum.**

Penguji I  
**MHD. KASTULANI,S.H.,M.H**

Penguji II  
**NURAINI SAHU,Hj.,S.H,M.H.**



Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Zulkifli, M.Ag.**

NIP. 19741006 200501 1 005



Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NOLA ARULIA ANGRANI  
 NIM : 11727201977  
 Tempat/Tgl. Lahir : PKL. Kerinci, 17, November 1999  
 Fakultas/~~Pascasarjana~~ : SYARIAH dan HUKUM  
 Prodi : ILMU HUKUM

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~\*:

PELAKSANAAN PERIZINAN BAGI USAHA UMKM (usaha menengah kecil mikro) BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI KABUPATEN PELALAWAN

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 November 2021

Yang membuat pernyataan



Nola Andia

NIM : 11727201977

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Nola Arulia Angriani, (2021) : Pelaksanaan Perizinan Usaha Bagi Usaha UMKM (usaha menengah kecil mikro) Berdasarkan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Di Kabupaten Pelalawan.**

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya perizinan mengenai izin usaha UMKM atau usaha menengah kecil mikro dimana seseorang yang memiliki usaha seharusnya memiliki perizinan usaha agar para usaha kecil tersebut memiliki kepastian hukum tapi pada kenyataan nya masih banyak yang belum memiliki izin usaha miko ini di karenakan masyarakat yang tidak mengetahui adanya izin usaha ini dan masyarakat juga tidak mau mengeluarkan biaya. Oleh sebab itu peneliti tertarik melakukan penelitian ini mengenai perizinan usaha mikro kecil atau UMKM yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Perizinan di Kabupaten Pelalawan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan yang dilakukan Dinas penanaman modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu melaksanakan perizinan usaha menengah kecil mikro atau UMKM sesuai dengan peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perizinan di kabupaten pelalawan dan faktor penghambat dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam melaksanakan izin usaha menengah kecil mikro atau UMKM di kabupaten pelalawan.

**Kata kunci : Perizinan, UMKM dan DPMPTSP.**



## KATA PENGANTAR

### *Assalamualaikum Wr. Wb*

Syukur Alhamdulillah, segala puji untuk Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat bersta salam tak lupanya diberikan kepada Baginda Rasulullah Shalallahu alaihi wasallam yang telah membawa ummatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatlan bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan motivasi yang bersifat material maupun yang bersifat spiritual terutama penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Sarno dan Ibunda Jamila yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, serta memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih atas do'a restu & ridha nya.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. H Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
4. Bapak Asril S.HI.,SH.,MH selaku ketua jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UniversitasIslam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Muslim, S.Ag.,S.H.,M.Hum. sebagai pembimbing skripsi yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Lovely Dwina Dahren S.H.MH. selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan.
8. Kepada ibu Erlinawati S.sos. selaku kasi pelayanan perizinan dan non perizinan A dan jajarannya yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. selaku Saudara Kandung Penulis Artika Dwi Permata Sari, Teguh Ahmad Alfarizhi, Tuah Ifan Sanjaya yang telah memberikan pengorbanan baik materi, tenaga , doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada seluruh saudara, keponakan dan yang lainnya, yang telah membantu Kepada doa agar penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan baik.
11. Kepada Prizal Efendi yang telah mensuporport penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Kepada teman-temanku Okta Sofia Rahmi, Ulfa Salsabila, Nurlailaturrahma yang telah memberi arahan serta menemani penulis dalam membuat skripsi

13. Terimakasih juga kepada Meytri Adinda Rahmatsyah, Umi Faridhatul Dawa, Misi Zulia Yuningsih, Alvina meidyanti, Mei Rezki Auliya, Nadya Afrila Yolani, Intan Sari Sandista, Nurli hayati, Farahmita Lismarani, Yazid Taufikurrahman, Hasbi rosyadi, dan yang lainnya sudah mensupport penulis dalam membuat skripsi.

14. Kepada teman-Teman Ilmu Hukum Angkatan 2017 dan Ilmu Hukum A.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan yang telah diberikan dan mendapatkan ridha-Nya. Semoga Skripsi ini membari manfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan. Aamiin ya rabbal alamin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru, Desember 2021

Penulis

**Nola Arulia Angriani**  
NIM. 11727201977



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Singkat Kabupaten Pelalawan .....	14
B. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.. .....	27
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pelayanan perspektif Dalam Negara Hukum.....	30
B. Good governance dalam persepektif pelayanan di Indonesia .....	33
C. Peran lembaga Negara dalam fungsi pelayanan publik.....	38
D. Hak warga Negara untuk memperoleh pelayanan oleh lembaga Negara .....	41
E. Badan Penanaman Modal dan Negara demokrasi .. .....	44
F. Undang-undang dan peraturan pemerintah tentang perspektif perizinan .. .....	45
G. Undang-undang tentang UMKM.....	47
H. Peraturan Pemerintah .....	48
I. Peraturan bupati pelalawan nomor 26 tahun 2020 .....	49
J. Perbedaan Usaha Kecil dan Usaha Kecil Mikro .....	51
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pelaksanaan perizinan usaha UMKM (usaha mennegah kecil mikro) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2016 Tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Pelalawan.....	53
B. Faktor Penghambat yang dihadapi Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu dalam melaksanakan perizinan usaha UMKM (usaha menengah kecil mikro) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Pelalawan.....	58
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran .....	69

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel I.1	Populasi dan Sampel .....	10
Tabel II.1	Luas Wilayah Kabupaten Pelalawan menurut Kecamatan .....	24



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kondisi pelayanan perizinan yang selama ini rumit, prosedur yang panjang, waktu yang lama, ketidak jelasan biaya, dan banyaknya praktik pungutan liar adalah potret buram dari buruknya pelayanan publik. Kondisi seperti ini sudah pasti berpengaruh besar terhadap lambanya investasi dan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan upaya yang harus dilakukan terpola, berkelanjutan dan dilaksanakan oleh semua jajaran aparatur pemerintah.

Sehubungan dengan hal itu, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang paket perbaikan iklim Investasi.<sup>1</sup>

Instruksi Presiden tersebut pada intinya mengamanatkan kepada beberapa instansi pemerintah untuk segera melakukan beberapa kebijakan, program, dan tindakan dalam meningkatkan iklim investasi. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kinerja dan menyederhanakan proses perizinan.

Menindaklanjuti instruksi tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).<sup>2</sup> Landasan pemikiran Peraturan menteri dalam negeri ini adalah keinginan untuk mengintegrasikan seluruh proses pelayanan publik, baik perizinan atau non perizinan kedalam

<sup>1</sup>Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang oaket perbaikan investasi.

<sup>2</sup>Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 Pasal 1 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

satu sistem penyelenggaraan terpadu agar birokrasi pelayanan menjadi lebih sederhana dan transparan.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 pasal 1 adalah kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen dilakukan secara transparan dan secara terpadu dalam satu tempat. Pemohon hanya bertemu dengan petugas customer service sehingga meminimalisasi interaksi dengan petugas perizinan.<sup>3</sup>

Pelayanan perizinan dilaksanakan oleh lembaga teknis perangkat daerah dengan kewenangan yang cukup, mulai dari penerimaan permohonan, pemrosesan, penandatanganan keputusan perizinan dan penerimaan pembayaran retribusi/pajak perizinan.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan penyempurnaan kebijakan pemerintah sebelumnya tentang Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) yang ditetapkan oleh edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 503/125/PUOD/1997 tentang Pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Atap.

Perbedaan konsep Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) salah satunya adalah wewenang penandatanganan. Meskipun tempat pelayanan disatukan dalam satu tempat, tetapi pada PTSA wewenang penandatanganan masih berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis. Lain halnya pola PTSP, wewenang dan penandatanganan berada pada kepala PTSP sehingga prosedur dan

---

<sup>3</sup>Paskalia, "Simak Perizinan Bagi UMKM (Modal Rakyat, 1 Juli 2019) <https://www.modalrakyat.id/blog/simak-perizinan-bagi-umkm-> diakses pada 22 oktober 2019

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pelayanan akan lebih mudah untuk mempercepat proses pelayanan. Dengan pola satu pintu ini diharapkan akan terjadi proses percepatan pelayanan, kepastian biaya, kejelasan prosedur, dan mengurangi berkas permohonan perizinan yang sama untuk dua atau lebih permohonan perizinan.

Penyederhanaan prosedur pelayanan ini, mutu produk pelayanan dan kepastian waktu pelayanan lebih terjamin, tapi ternyata penyederhanaan ini bukan hal mudah, di beberapa daerah, pada tahap awal pembentukan pola ini sering mendapat tantangan. Oleh karena itu diperlukan komitmen yang sungguh-sungguh dan kemauan yang kuat dari pihak terkait untuk merubah paradigma dan reposisi peran pemerintah dengan memperbaiki kinerja pelayanan kepada masyarakat.

Bentuk pelayanan terpadu yang akan dikembangkan di daerah ditetapkan melalui keputusan pemerintah daerah setempat. Sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Pasal 9 ayat 4 yang menyebutkan urusan konkuren di serahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah<sup>4</sup> Begitu juga di Kabupaten Pelalawan, dalam proses pelayanan perizinan menggunakan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Akan tetapi di Kabupaten tidak menggunakan istilah PTSP melainkan menggunakan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) dengan prinsip dan proses yang sama. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan perizinan.<sup>5</sup>

<sup>4</sup>Undang-Undang Dasar Nomor 23 tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah.

<sup>5</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perizinan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Telah di atur juga di dalam peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 27 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.<sup>6</sup>

Terdapat 18 jenis perizinan salah satunya koperasi, usaha kecil menengah dan perdagangan. Dan peraturan Bupati Kabupaten Pelalawan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Menandatangani Perizinan dan Non-Perizinan Serta Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan.<sup>7</sup>

Selain itu Dinas Pelayanan Terpadu juga mempunyai Standar Oprasional Prosedur (SOP) pelayanan yang jelas pada jenis-jenis pelayanan yang diberikan seperti pelayanan Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM), Pemohon terlebih dahulu melengkapi semua persyaratan dan kemudian menyerahkannya kepada petugas meja/loket pelayanan. Untuk waktu penyelesaian dari surat perizinan usaha mikro ini adalah 60 (enam puluh) menit atau maksimal 1 (satu) hari kerja dan tidak dikenakan biaya atau gratis.

Berikut persyaratan yang harus dilengkapi pemohon :

1. Fotocopy ktp;
2. Fotocopy kk;
3. Pas foto;
4. Foto usaha yang dimiliki;
5. Memiliki E-mail yang aktif.

<sup>6</sup>Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

<sup>7</sup>Peraturan Bupati Kabupaten Pelalawan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang pendelegasian wewenang menandatangani perizinan dan non perizinan serta penyelenggaraan kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten pelalawan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan penjelasan diatas, sudah tertulis secara jelas standar prosedur pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Namun, kenyataan di lapangan masih ditemukan fenomena-fenomena, yakni :

1. Waktu penyelenggaraan pelayanan perizinan usaha kecil mikro atau UMKM dengan waktu tunggu pemohon dan proses penyelesaian masih terlalu lama selama 3 (tiga) hari padahal dalam SOP di katakan hanya proses penyelesaian hanya 60 (enam puluh) menit atau maksimal 1 (satu) hari kerja.<sup>8</sup>
2. Berdasarkan informasi yang beredar dimasyarakat bahwa masih adanya petugas/pegawai yang minta biaya dalam pengurusan Perizinan Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) kepada masyarakat, padahal biayanya gratis.<sup>9</sup>

Oleh karna itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam Perizinan Usaha UMKM (usaha menengah kecil mikro) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Pelalawan.

## B. Batasan Masalah

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak terlalu luas serta lebih mudah dipahami, maka penulis membatasi permasalahan pada penelitian ini

<sup>8</sup> Wawancara kepada staff dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

<sup>9</sup> Wawancara kepada masyarakat yang mengurus perizinan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



membahas tentang Pelaksanaan Perizinan Bagi Usaha UMKM (usaha menengah kecil mikro) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Pelalawan.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Perizinan Bagi Usaha UMKM (usaha menengah kecil mikro) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Pelalawan ?
2. Apa saja faktor penghambat Pelaksanaan Perizinan Bagi Usaha UMKM (usaha menengah kecil mikro) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Pelalawan ?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
  - a. Mengetahui Pelaksanaan Perizinan Bagi Usaha UMKM (usaha menengah kecil mikro ) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Pelalawan .
  - b. Mengetahui Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Perizinan Bagi Usaha UMKM (usaha menengah kecil mikro) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Pelalawan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan pendidikan mengenai Pelaksanaan Perizinan Bagi Usaha UMKM (usaha menengah kecil mikro) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Pelalawan, Dan juga diharapkan dapat memberikan referensi tambahan bagi para akademis, penulis dan kalangan yang berminat dalam penelitian yang sama.
- b. Manfaat Praktis Untuk kegunaan dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah terkhusus di Kabupaten Pelalawan sebagai acuan demi terlaksananya dan tercapainya tujuan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 , dalam hal Penyelenggaraan Perizinan.
- c. Manfaat Akademis Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

## E. Metode Penelitian

Istilah metode penelitian terdiri dari dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek dan objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Adapun

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif atau kualitatif, eksperimental maupun non-eksperimental, interaktif maupun non-interaktif.<sup>10</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistem penelitian sosiologis atau empiris. Penelitian hukum sosiologis memandang hukum sebagai fenomena sosial (yang berbeda dengan penelitian hukum normatif di dalam sistem perundang-undangan nasional), dengan pendekatan struktural dan umumnya kualitatif yaitu asumsi masyarakat dalam mencari fakta-fakta yang terjadi dilapangan untuk menjawab suatu permasalahan yang ada, Dengan mengadakan penelitian langsung dilapangan mengenai mekanisme pelaksanaan perizinan bagi usaha UMKM (usaha menengah kecil mikro ) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan di kabupaten Pelalawan.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala suatu kelompok tertentu, untuk menemukan penyebaran suatu gejala lain dalam masyarakat.

<sup>10</sup>Jonaidi Efendi dkk, *Metode Penelitian hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta Prenadamedia Group, 2018), cetakan 2, hal 2.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian Dilakukan Dikantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Komplek Perkantoran Bhakti Praja, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

## 3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek Penelitian adalah tempat, orang atau benda yang diamati dalam rangka pembumbutan sebagai sasaran, Adapun subjek dalam penelitian ini adalah ketua dinas penanaman modal, Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A, Anggota Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A, masyarakat yang mengurus perizinan.

Objek Penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian, Disebut juga dengan pokok persoalan lebih terarah. Adapun objek dalam penelitian ini ialah mekanisme Pelaksanaan Perizinan Bagi Usaha UMKM (usaha menengah kecil mikro) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Pelalawan.

## 4. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama, populasi berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu dan tempat dengan sifat atau ciri yang sama.<sup>11</sup>

<sup>11</sup>Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta; Sinar Grafik, 2014), hal 98.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Dinas Penanaman Modal, Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A, Anggota bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A;
- 2) Masyarakat yang mengurus perizinan.

**b. Sampel**

Sampel adalah bagian dari populasi.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan sensus dan total sampling. Sensus adalah penetapan berdasarkan jumlah populasi yang ada, sedangkan total sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel yang diambil sama dengan populasi.<sup>13</sup>

**Tabel I.1**  
**Populasi dan Sampel**

No	Responden	Populasi	Sempel	Persentase	Keterangan
1	Kepala Dinas	1 Orang	1 Orang	100 %	Wawancara
2	Kasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A	1 Orang	1 Orang	100%	Wawancara
3	Staff Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A	10 Orang	5 Orang	10%	Wawancara
4	Masyarakat yang mengurus izin	100 Orang	10 Orang	10%	Wawancara

Sumber : Data Olahan, 2021

<sup>12</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), hal 117.

<sup>13</sup>Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta, Selemba Humanika, 2010) hal 106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui responden dilapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan masalah yang diteliti.<sup>14</sup> Pengumpulan data primer dengan melakukan wawancara atau interview langsung kepada responden, serta observasi data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat lokasi penelitian.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta Peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.<sup>15</sup>

### c. Data Tersier

Data Tersier merupakan penjelasan terhadap data primer dan sekunder, atau disebut juga sebagai data Pendukung dalam mengamati dan mencatat serta menemukan hasil permasalahan yang sedang diteliti. Dalam hal ini Penulis menggunakan Buku-buku, Artikel, Jurnal, Modul, dan yang berhubungan dengan Kepustakaan yang dapat membantu dalam Penelitian serta juga membutuhkan Angket dan

<sup>14</sup>Deripson Siagia Sugiarto, *Metode Statiska*, (Jakarta : PT.Granmedia Pustaka Utama, 2006), hal.16.

<sup>15</sup>Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982) hal.71.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi dalam menemukan Gejala-gejala dari Permasalahan yang sedang di Teliti.<sup>16</sup>

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindera mata serta dibantu dengan panca indera lainnya.
- b. Wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Dalam penelitian wawancara yang dilakukan ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Kasi Bidang Pelayanan dan Non Pelayanan A, Anggota Kasi Pelayanan dan Non Pelayanan A, dan Masyarakat yang mengurus Perizinan.<sup>17</sup>
- c. studi kepustakaan yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

## 7. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun dan dianalisa secara kualitatif yang merupakan tata cara

<sup>16</sup>HAJAR.m, *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas syariah dan hukum Uin Suska Riau, 2011), hal,53.

<sup>17</sup>Hasnan Teknik Observasi (sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial),( Jakarta : At-Taqqaddum 8(1) hal. 21-46

penelitian yang menghasilkan penelitian deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan fakta-fakta lapangan dipelajari serta dituangkan pada hasil penelitian ini. Kemudian dari pembahasan tersebut akan ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dengan cara menganalisis dari permasalahan yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten pelalawan

##### 1. Sejarah Singkat Kabupaten pelalawan

Pelalawan adalah nama sebuah kabupaten yang terdapat di provinsi Riau. Kabupaten Pelalawan berdiri pada tahun 1999, yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kampar. Sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Pelalawan adalah nama sebuah kerajaan melayu . wilayah kerajaan ini berada di bagian hilir Sungai Kampar. Kerajaan ini berdiri tahun 1761, dan mulai terkenal pada masa pemerintahan Sultan Syed Abdurrahman Fachruddin (1811-1822).<sup>18</sup> Berdasarkan cerita dahulunya nama Sungai Kampar adalah Laut Ombun.

Kata Pelalawan sebenarnya terambil dari kata lalau yang kemudian mendapat imbuhan pe – an . Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata lalau berarti merintang; menghalang-halangi; mencegah, dan kata pelaluan mengandung arti proses, cara atau perbuatan merintang, yakni merintang dan menghalangi kemungkinan datangnya musuh. Dalam bahasa Melayu Pelalawan, kata lalau berarti; sesuatu yang telah dipesan atau ditandai untuk diambil, sehingga kata pelalawan mengandung arti; suatu tempat yang telah dipesan, dicadangkan atau ditandai sebelum pindah ketempat tersebut.

<sup>18</sup>Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Pelalawan Dalam Angka 2016, (Pangkalan Kerinci: BPS Kabupaten Pelalawan, 2016)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika ditelusuri sejarahnya, Kabupaten Pelalawan memiliki sejarah yang sangat panjang. Bermula dari kerajaan Pekantua. Yang mana kerajaan Pekantua ini beribukotakan Pematang Tua yang terletak di pinggir Sungai Pekantua, anak sungai Kampar, kurang lebih 20 kilometer dari Muara Tolam. Kerajaan Pekantua didirikan oleh Maharaja Indra, bekas orang besar Kerajaan Tamasik (Singapura) yang melarikan diri ke Pekantua setelah Tamasik dikalahkan Majapahit pada tahun 1380 masehi. Sedangkan raja Tamasik yang terakhir bernama Permaisura (Prameswara) mengundurkan diri ke Semenanjung Tanah Melayu, kemudian mendirikan Kerajaan Melaka disana. Dengan demikian dapat diperkirakan bahwa Kerajaan Pekantua berdiri sekitar tahun 1380 masehi.<sup>19</sup>

Maharaja Indra memerintah Pekantua selama kurang lebih 40 tahun (1380-1420 M). Sebagai seorang raja selain membangun istana di Pematang Tua, juga membangun candi yang diberi nama Candi Hyang berdampingan dengan istana yang dibangunnya. Candi tersebut dibangun di atas sebuah bukit yang bernama Bukit Tua, sehingga bukit itu lazim disebut bukit Hyang. Bukit tersebut dikenal dengan sebutan Pematang Buluh dan Pematang Lubuk Emas. Lokasi candi diperkirakan berada di Desa Lubuk Emas, dalam wilayah

Kecamatan Pangkalan Bunut sekarang. Diwilayah itulah dahulu penduduk setempat menemukan batu-batuan berupa arca orang sedang

---

<sup>19</sup>Hidayat, Akulturasi Islam dan Budaya Melayu Studi Tentang Ritus Siklus Kehidupan Orang Melayu Di Pelalawan provinsi Riau, ( Jakarta : Badan Litbanh dan Diklat Departemen Agama RI,2009) Cet.I,hal.39

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertapa, yang oleh penduduk setempat disebut dengan batu batopo. Mengenai batu candi yang ditemukan adalah sejenis batu pasir berbentuk batu bata berukuran besar. Batu itu ternyata serupa dengan jenis batu Candi Muara Takus yang terdapat di Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Mengenai batas wilayah kerajaan ini diperkirakan batasnya ke hulu sungai Kampar tidaklah sampai ke daerah persimpangan Kampar Kanan dan Kampar Kiri.<sup>5</sup> Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa agama pertama di Kerajaan Pekantua adalah agama Hindu-Budha.

Kerajaan Pekantua terus berkembang dan berkuasa lebih kurang selama 125 tahun dengan raja-raja; Maharaja Indra (1380-1420 M), Maharaja Pura (1420-1445 M), Maharaja Laka (1445-1460 M), Maharaja Syisa (1460-1480 M), dan Maharaja Jaya (1480-1505). Pada masa pemerintahan Maharaja Jaya Kerajaan Pekantua sampai dipuncak kejayaannya dengan dikenal sebagai bandar yang banyak menghasilkan komoditas perdagangan, terutama hasil hutannya. Bandar itu bernama Bandar Nasi-nasi<sup>6</sup>, terletak disebelah Bandar Pekantua. Berita tentang kemajuan Kerajaan Pekantua akhirnya sampai ke Kerajaan Melaka. Saat itu pada masa pemerintahan Sultan Mansyur Syah. Sultan Mansyur Syah mengangkat Sri Nara Diraja sebagai panglima perang. untuk menakhlukkan kerajaan Pekantua. Akhirnya karena kekuatan yang tidak seimbang, Kerajaan Pekantua dapat dikuasai oleh Kerajaan Melaka pada tahun 1505 Masehi. Setelah Kerajaan Pekantua dikuasai maka diangkatlah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Munawwar Syah sebagai raja disana. Pada masa pemerintahan Munawwar Syah nama kerajaan Pekantua berganti menjadi Kerajaan Pekantua Kampar.<sup>20</sup>

Raja Munawwar Syah memerintah pada tahun 1505 – 1511 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh anaknya Raja Abdullah (1511-1515 M). Saat itu pula di Kerajaan Melaka, Sultan Mansyur Syah meninggal kemudian digantikan oleh Sultan Alauddin Ri'ayat Syah I. Selanjutnya setelah Sultan Alauddin Ri'ayat Syah I mangkat maka digantikan oleh Sultan Mahmud Syah I. Pada masa inilah Kerajaan Melaka diserang dan dikalahkan oleh Portugis pada tahun 1511 M. Sultan Mahmud Syah I mengundurkan diri ke Muar kemudian ke Bintan, hingga pada akhirnya tahun 1526 masehi beliau sampai ke Pekantua Kampar.<sup>21</sup>

Perjuangan melawan Portugis dibantu oleh Raja Abdullah. Namun pada akhirnya perjuangan ini dapat dikalahkan oleh Portugis dan menyebabkan Raja Abdullah Ketika Sultan Muhammad Syah I sampai ke Pekantua Kampar pada tahun 1526 M, beliau dinobatkan menjadi raja Pekantua Kampar. Beliau memerintah pada tahun 1526-1528 Masehi. Setelah beliau wafat pada tahun 1528 Masehi, beliau diberi gelar Marhum Kampar dan keduduakn beliau digantikan oleh Raja Ali bergelar Sultan Alauddin Riayat Syah II yang merupakan putra dari Sultan Muhammad Syah I. Beliau memerintah pada tahun 1528 – 1530 masehi. Sultan Alauddin Riayat Syah II tidak lama memerintah karena pada tahun 1530

<sup>20</sup>Hidayat, Op. Cit, h. 40-44.

<sup>21</sup>Ibid,h.44.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masehi beliau meninggalkan Pekantua Kampar dan pergi ke Tanah Semenanjung, kemudian mendirikan negeri Kuala Johor. Sebelum berangkat meninggalkan Pekantua Kampar, beliau menunjuk dan mengangkat Tun Perkasa, Mangkubumi Pekantua Kampar, menjadi pemangku Kerajaan Pekantua Kampar pada tahun 1530 – 1551 masehi. Kemudian digantikan oleh Tun Hitam (1551-1575 M). Selanjutnya Tun megat (1575-1590 M).tertawan sehingga terjadi kekosongan kekuasaan dan menyebabkan rakyat lari ke Sungai Kerumutan. Dalam masa kekosongan itu Kerajaan Pekantua Kampar dijalankan oleh Mangkubumi sebagai pemangku kerajaan dan berlangsung selama lebih kurang 12 tahun (1515-1526 M).

Johor yang pada masa itu dipimpin oleh Sultan Abdul Jalil Syah (cucu Sultan Alauddin Riayat Syah II) telah berkembang pesat. Tun Megat, merasa sudah sepantasnya mengirim utusan ke Johor untuk meminta agar salah seorang keturunan Sultan Alauddin Riayat Syah II kembali ke Pekantua Kampar untuk menjadi raja. Dan pada akhirnya ditunjuklah „Abd ar-Rahman.

Menjadi raja di Pekantua Kampar (1590-1630 M). „Abd ar-Rahman diberi gelar Maharaja Dinda dan beliau amat mencintai laut. Beliau mendirikan tempat pembuatan kapal layar di Petatal dan Limbungan (sekarang berada di wilayah Desa Sungai Ara, Kecamatan Bunut), bandar dagang yang sebelumnya berpusat di Bandar Nasi-nasi beliau pindahkan ke Telawan Kandis. Selain itu, beliau memindahkan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ibukota kerajaan dari Pekantua (Pematang Tua) ke Bandar Tolam (sekarang Desa Tolam, Kecamatan Pelalawan).

Setelah Maharaja Dinda wafat, maka beliau digantikan oleh Maharaja Lela Utama (1630-1650 M), Maharaja Lela Bangsawan (1650-1675 M), Maharaja Lela Utama II (1675-1686), Pada masa pemerintahan Maharaja Lela Utama II ibukota pemerintahan dipindahkan ke Tanjung Negeri di kawasan Sungai Nilo, anak Sungai Kampar, sekarang termasuk ke dalam wilayah Desa Kuala Terusan, Kecamatan Langgam. Setelah beliau wafat digantikan oleh Maharaja Wangsa Jaya (1686-1691 M). Pada masa pemerintahannya Tanjung Negeri diserang wabah penyakit dan banyak membawa korban jiwa. Kemudian setelah beliau wafat, digantikan oleh putranya Maharaja Muda Lela (1691-1720), kemudian Maharaja Dinda II (1720-1750 M). pada masa pemerintahan Maharaja Dinda II diperoleh kesepakatan untuk memindahkan pusat kerajaan Pekantua Kampar dari Tanjung Negeri ke tempat yang oleh moyangnya sendiri, Maharaja Lela Utama, pernah di-lalau-kan (ditandai, dicadangkan) untuk dijadikan pusat kerajaan, yaitu Sungai Rassau, salah satu anak Sungai Kampar, tidak jauh kehilir Sungai Nilo. Sekitar tahun 1725 Masehi dilakukanlah pemidahan pusat kerajaan dan pada saat itu pula Maharaja Dinda II mengumumkan perubahan nama Kerajaan Pekantua Kampar menjadi Kerajaan Pelalawan.

Saat itu juga terjadi kerusuhan di Johor dan pada akhirnya Sulaiman Badar al-.,Alam duduk sebagai raja di Johor. Bersamaan dengan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu dijadikan sebuah momen bagi Kerajaan Pelalawan untuk melepaskan diri dari Kerajaan Johor. Kerajaan Pelalawan berpendapat bahwa Johor tidak lagi diperintah oleh raja-raja dari keturunan Sulta Alaudidin Riayat Syah. Selanjutnya pada tahun 1750 masehi Maharaja Dinda II meninggal dan kedudukannya digantikan oleh Maharaja Lela Bungsu yang memerintah pada tahun 1750 samapai 1775 Masehi. Pada masa pemerintahannya Kerajaan Pelalawan berkembang dengan pesatnya. Diantara kemajuan yang dicapai ialah memperluas daerah kekuasaan sampai ke Betung (termasuk kedalam wilayah Pangkalan Kuras sekarang), disamping itu juga meningkatkan hubungan dengan Indragiri, Jambi, Petapahan, Mempura, Kerinci, Kampar Kanan dan Kampar Kiri.

Maharaja Lela Bungsu meninggal pada tahun 1775 Masehi, kemudian digantikan oleh Maharaja Sinda II yang memerintah pada tahun 1775 – 1810 Masehi. Pada tahun 1806 terjadi penyerangan dari Kerajaan Siak karena kerajaan Siak ingin memperluas daerah kekuasaannya, namun pada penyerangan ini Siak dapat dikalahkan. Kemudian setelah Maharaja Sinda II wafat, beliau digantikan oleh Maharaja Lela II (1810-1811 M). pada masa ini

Siak kembali melakukan penyerangan ke Pelalawan hingga pada akhirnya Pelalawan menyerah, kekalahan ini disebabkan oleh adanya pengkhianat di kubu Kerajaan Pelalawan. Maharaja Lela II lari ke Tambak Segati, Langgam dan terjadi kekosongan kekuasaan. Pada saat kekosongan kekuasaan inilah Sayyid Abd Rahman dilantik sebagai sultan di Pelalawan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan gelar As-Sayyid as-Syarif Abd ar-Rahman Fakhr ad-Din yang mana beliau ini adalah pemimpin ekspedisi Kerajaan Siak dalam menyerang Kerajaan Pelalawan. Kedudukan Sultan berikutnya digantikan oleh Sayyid Hasyim (1822-1828), Sultan Ismail (1828-1844 M), Sultan Hamid (1844-1866 M). pada masa ini agama Islam berkembang dengan luas, beliau juga mendatangkan guru-guru agama dari luar daerah.

Setelah Sultan Hamid meninggal maka digantikan oleh Sultan Jaafar (1866-1872 M), Sultan Abu bakar (1872-1886 M), pada masa ini Kerajaan Pelalawan mulai dikuasai Belanda, sehingga pada tanggal 4 februari 1879 terjadi penyerahan kekuasaan kepada Belanda. Meski dibawah kekuasaan Belanda pemerintahan dilanjutkan dengan pemimpin berikutnya Tengku Sentol (1886-1892 M), beliau memberikan perhatian yang cukup besar dibidang seni dan sastra namun di dalam itu tetap berusaha melawan Belanda, dilanjutkan dengan Syarif Hasyim (1892-1930), Sayyid Usman dan Sayyid Harun pada tahun 1940.

Pemerintahan yang dijalankan oleh Tengku Sayyid Harun sebagai raja Kerajaan Pelalawan berlangsung singkat karena masuknya Jepang ke Indonesia pada tahun 1943 Masehi, dan proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 yang membawa perubahan besar bagi tata pemerintahan Kerajaan Pelalawan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Tengku Sayyid Harun bersama Orang Besar Kerajaan Pelalawan pada tanggal 20 Oktober 1945, yang menyatakan taat setia dan bersatu dalam Negara Republik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia, dan menyediakan sebagian wilayah Kerajaan Pelalawan sebagai basis perang gerilya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1955 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan provinsi Sumatera Tengah dan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, maka wilayah eks Kerajaan Pelalawan masuk dalam daerah Kabupaten Pelalawan.

Pada perkembangan berikutnya, Pelalawan menjadi sebuah Kabupaten berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan delapan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Oktober 1999 di Jakarta dan Operasional Pemerintah Daerah tanggal 5 Desember 1999, salah satu diantaranya adalah Kabupaten Pelalawan. Pada awal terbentuknya, Kabupaten Pelalawan memiliki luas wilayah 13.924,94 KM<sup>2</sup> dan 4 kecamatan, yaitu; Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, dan Kuala Kampar.

Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 terbagi menjadi 10 kecamatan, dengan kecamatan pemekaran yaitu; Pangkalan Kerinci, Ukui, Pangkalan Lesung, Pelalawan, Kerumutan dan Teluk Meranti. Terakhir berdasar Perda No 06 tahun 2005 kembali dimekarkan menjadi 12 kecamatan. Kecamatan hasil pemekaran yaitu

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bandar Petalangan dan Bandar Seikijang. Dalam perkembangannya, Kabupaten Pelalawan secara administratif terdiri atas 12 kecamatan, yang meliputi 106 desa dan 12 kelurahan. 20 12 Kecamatan itu adalah; Kecamatan Bandar Seikijang, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Langgam, Kecamatan Pelalawan, Kecamatan Teluk Meranti, Kecamatan Kuala Kampar, Kecamatan Kerumutan, Kecamatan Bunut, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kecamatan Bandar Petalangan, Kecamatan Pangkalan Lesung, dan Kecamatan Ukui dengan Kecamatan Pangkalan Kerinci sebagai ibukota kabupaten. Pada tahun 2001 kepala daerah Kabupaten Pelalawan ditunjuk oleh DPRD dengan pasangan H. T Azmun Ja'afar dan H. Anas Badrun. Kemudian, bulan februari 2006, dilakukan pemilihan kepala daerah secara langsung yang pertama dan terpilihlah pasangan H. T Azmun Ja'afar sebagai Bupati dan wakilnya Drs. H Rustam Efendi periode 2006-2012. Pemilu pada tahap kedua dilaksanakan pada tahun 2012 dan terpilihlah H. M Harris sebagai Bupati Pelalawan dan wakilnya Marwan Ibrahim. Dan periode ketiga pada tahun 2016, H. M Harris kembali terpilih menjadi bupati dengan wakilnya Zardewan.

## 2. Kondisi Geografis Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan terletak dipesisir pantai timur pulau Sumatera antara 1.25° lintang utara sampai 0,20° lintang selatan dan antara 100,42° bujur timur sampai 103,29 bujur timur. Luas wilayah kabupaten Pelalawan tercatat 13.925 KM<sup>2</sup> atau 14,73% dari total luas Provinsi Riau. Ibukota Kabupaten terletak di Kecamatan Pangkalan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerinci. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Teluk Meranti (30,45%) dan terkecil Kecamatan Pangkalan Kerinci (1,39%).<sup>22</sup>

**Tabel II.I**  
**Luas Wilayah Kabupaten Pelalawan Menurut Kecamatan**

No	Kecamatan	Daratan	Perairan	Total	% wilayah
1	Langgam	142.396,15	1.848,94	144.245,09	10,36
2	Pangkalan kerinci	18.716,16	639,37	19.355,53	1,39
3	Bandar seikijang	31.856,87	84,33	31.941,20	2,29
4	Pangkalan Kuras	117.746,75	642,40	118.388,79	8,50
5	Ukui	129.268,77	687,29	129.956,06	9,33
6	Pangkalan Lesung	50.159,83	325,29	50.485,12	3,63
7	Bunut	40.620,09	182,68	40.802,77	2,93
8	Pelalawan	147.060,05	2.751,26	149.811,31	10,76
9	Bandar Petalangan	36.996,29	258,87	37.255,16	2,68
10	Kuala Kampar	80.905,73	69.359,46	150.265,19	10,79
11	Kerumutan	95.314,31	689,35	96.003,66	6,89
12	Teluk Meranti	391.140	32.843,94	423.984,41	30,45
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>1.282.181,47</b>	<b>110.312,82</b>	<b>1.392.294,29</b>	<b>100.00</b>

Kabupaten Pelalawan dilintasi beberapa sungai besar, salah satunya adalah Sungai Kampar yang memanjang dari arah hulu (S. Koto Panjang) dan bermuara dilaut Cina Selatan. Total panjang sungai Kabupaten Pelalawan 1.821,7 KM. Dibeberapa daerah aliran sungai juga dimanfaatkan sebagai kawasan pemukiman penduduk, seperti di Kecamatan Teluk Meranti dan Kecamatan Pelalawan. Kabupaten Pelalawan juga dilintasi garis Khatulistiwa di beberapa daerahnya seperti di Kecamatan Pangkalan Lesung dan Kecamatan Kerumutan

Luas wilayah Kabupaten Pelalawan terdiri dari 92,08% daratan dan 7,92% perairan. Dilihat dari tipografi, letak ketinggian ibukota kecamatan sebagian besar berupa dataran rendah. Dari seluruh kecamatan, kecamatan yang paling rendah ketinggiannya adalah Kecamatan Kuala Kampar

<sup>22</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan, Statistik Daerah kabupaten Pelalawan Tahun 2016, Op. Cit, hal 1.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setinggi 2 meter, Teluk Meranti 3 meter, dan Pelalawan setinggi 5 meter.<sup>23</sup> Dan daerah yang tertinggi adalah Langgam, Pangkalan Kerinci, Pangkalan Kuras, Pangkalan Lesung, Ukui, dan Bandar Seikijang dengan tinggi masing-masing 30 meter diatas permukaan air laut.

Perbatasan wilayah Kabupaten pelalawan dapat dilihat sebagaimana berikut ini :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Siak (Kecamatan Sungai Apit dan Kecamatan Siak) dan Kabupaten Kepulauan Meranti (Kecamatan Tebing Tinggi).
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hilir (Kecamatan Kateman, Mandah, dan Gaung), Kabupaten Indragiri Hulu (Kecamatan Rengat, Pasir Penyu dan Kuala Cenaku), dan Kecamatan Kuantan Singingi (Kecamatan Singingi dan Kuantan Hilir).
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar (Kecamatan Kampar Kiri dan Siak Hulu) dan Kota Pekanbaru (Kecamatan Rumbai dan tenayan Raya)
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Kepulauan Riau.

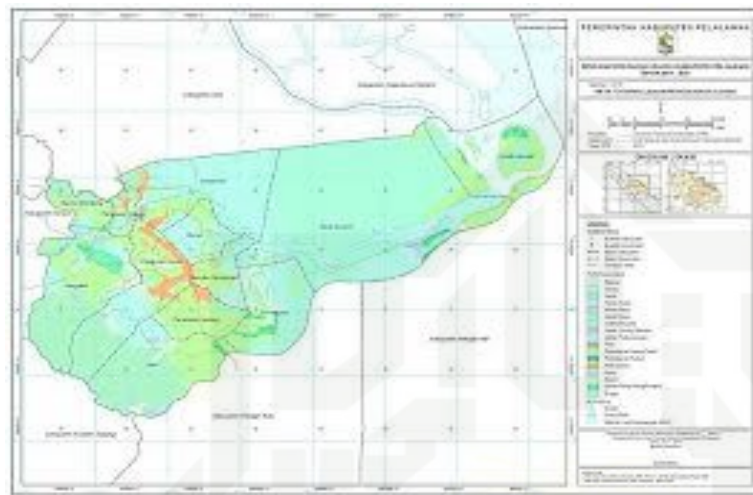


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk gambaran lebih jelas dapat dilihat peta Kabupaten Pelalawan berikut ini

**Peta Kabupaten Pelalawan**



**3. Visi dan Misi Kabupaten Pelalawan**

**VISI KABUPATEN PELALAWAN**

Visi tersebut terdiri dari 2 unsur utama yaitu PELALAWAN MAJU. Kata MAJU terdiri dari beberapa akronim sebagai berikut:

- a. Pelalawan Makmur;
- b. Pelalawan Adil;
- c. Pelalawan Jaya ;
- d. Pelalawan Unggul .

**MISI KABUPATEN PELALAWAN**

- a. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan iman. (Maju SDM);
- b. Mewujudkan kemakmuran ekonomi di Perkotaan dan Perdesaan yang mandiri dan berdaya saing (Maju Ekonomi);

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, lengkap , dan berkelanjutan (Maju Infrastruktur);
- d. Mengembangkan pariwisata daerah berbasis partisipasi masyarakat dan budaya melayu sebagai perekat negeri (Maju Wisata & Budaya);
- e. Mewujudkan Tata Kelola dan layanan Pemerintahan yang humanis (Good Public Services) berbasis data dan teknologi informasi (Maju Kepemerintahan).

**B. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)**

**1. Sejarah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.**

Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP) Kabupaten Pelalawan didasarkan kepada Nomen Klatur yang ditetapkan melalui Pemendagri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomen Klatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP) Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai turunan dari peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. DPMPTSP Kabupaten Pelalawan Sebelumnya bernama Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu ( BPMP2T) yang dibentuk pada tahun 2013 sebagai penggabungan dari satu Badan dan satu kantor sebagai inis pelaksana teknis daerah, yaitu Badan Penanaman Modal (BPM) dan Kantor Pelayanan Terpadu ( KPT) Kabupaten Pelalawan. DPMPTSP Kabupaten Pelalawan ini dibentuk melalui

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2016, Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan.

**2. Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

**VISI KABUPATEN PELALAWAN**

“ TERWUJUDNYA KABUPATEN PELALAWAN YANG  
SEJAHTERA,MANDIRI,INOVATIF,DAN BERDAYA SAING  
GLOBAL SECARA BERKELANJUTAN, DALAM MASYARAKAT  
INKLUSIF YANG BERADAT,BERIMAN,BERTAKWA DENGAN  
MENGEMBANGKAN NILAI BUDAYA MELAYU TAHUN 2025 “

Rumusan Visi tersebut diatas mengandung makna sebagai berikut :

- a. Kabupaten Pelalawan yang maju dan sejahtera ;
- b. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan ;
- c. Pertanian yang unggul ;
- d. Industri yang tangguh ;
- e. Masyarakat beriman dan bertaqwa serta kebudayaan melayu.

**MISI KABUPATEN PELALAWAN**

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, sandang pangan, papan, pendidikan, kesehatan, bermartabat dan berbudaya ;
- b. Menciptakan lapangan kerja yang meningkatkan pendapatan masyarakat masyarakat melalui pembangunan usaha ekonomi kerakyatan ;



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Meningkatkan hasil dan mutu pertanian melalui pemanfaatan teknologi berbasis agrobisnis serta pengelolaan hutan-hutan yang lestari ;
- d. Menciptakan dan membina industri yang mampu menghasilkan produk yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan ;
- e. Peningkatan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari melalui pendidikan agama dan memfungsikan lembaga-lembaga keagamaan sebagai wadah pembinaan umat.<sup>23</sup>

### 3. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



<sup>23</sup><https://www.dpmptsp.pelalawankab.go.id/standar-pelayanan.html>



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINJAUAN KEPUSTAKAAN

### A. Pelayanan Perspektif dalam Negara Hukum

Dalam menjalankan fungsinya hukum memerlukan berbagai perangkat dengan tujuan agar hukum memiliki kinerja yang baik yang memiliki kaidah yang bersifat memaksa dan apabila dituangkan dalam sebuah perundang-undangan maka setiap orang harus melaksanakannya. Untuk mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau kolektivitas yang bersifat preventif adalah melalui izin. Dalam perspektif hukum penyelenggaraan perizinan berbasis pada teori negara modern yang merupakan perpaduan antara konsep negara hukum (*rechtstaat*) dan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Negara hukum secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai acuan tertinggi dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan (*supremasi hukum*)<sup>24</sup>.

Menurut Vesteden hukum yang *supreme* mengandung makna :

1. Bahwa suatu tindakan hanya sah apabila dilakukan menurut atau berdasarkan hukum tertentu (asas legalitas). Ketentuan-ketentuan hukum hanya dapat dikesampingkan dalam hal kepentingan umum benar-benar menghendaki atau penerapan suatu aturan hukum akan melanggar dasar-dasar keadilan yang berlaku dalam masyarakat (*principles of natural justice*).

---

<sup>24</sup>Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Ada jaminan yang melindungi hak-hak setiap orang baik yang bersifat asasi maupun yang tidak asasi dari tindakan pemerintah atau pihak lainnya.

Dengan demikian, dalam suatu negara hukum setiap kegiatan kenegaraan atau pemerintahan wajib tunduk pada aturan-aturan hukum yang menjamin dan melindungi hak-hak warga negaranya, baik di bidang sipil dan politik maupun di bidang sosial, ekonomi dan budaya. Dengan perkataan lain, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan untuk menata masyarakat yang damai, adil dan bermakna. Oleh karena itu, setiap kegiatan kenegaraan atau pemerintahan harus dilihat sebagai bentuk penyelenggaraan kepentingan masyarakat (public service) yang terpancar dari hak-hak mereka yang mesti dilayani dan dilindungi. Itulah sebabnya konsep negara hukum yang dikembangkan dewasa ini selalu terkait dengan konsep negara kesejahteraan.

Dalam menjalankan fungsinya hukum memerlukan berbagai perangkat agar memiliki kinerja yang baik. Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempunyai arti netral, sehingga dampak positif maupun negatifnya terletak pada substansi atau isi faktor tersebut. Adapun faktor yang dimaksud adalah :

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana;
4. Faktor masyarakat;
5. Faktor kebudayaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kelima faktor tersebut secara garis besar diperlukan untuk tercapainya efektifitas dan efesiensi kinerja dari hukum itu sendiri. Faktor hukum dan faktor kebudayaan dianggap sebagai patokan dalam pelaksanaan kegiatan. Hukum sebagai dasar terciptanya perundangundangan yang menjadi sumber hukum, sedangkan kebudayaan mengenai konsepsi abstrak dalam masyarakat mengenai apa yang baik, layak dan buruk. Faktor aparatur pemerintah dan faktor sarana sebagai alat atau unsur untuk melaksanakan semua tindakan pelayanan publik.

Faktor masyarakat adalah faktor yang penting karena pada intinya penyelenggaraan pelayanan publik diperuntukkan untuk masyarakat dan masyarakatlah yang memerlukan berbagai pelayanan dari pemerintah. Kemasyarakatan pelayanan publik berasal dari masyarakat (publik) dimana tujuan utamanya adalah untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat seutuhnya, oleh karena itu masyarakat dapat mempengaruhi terciptanya penyelenggaraan publik yang baik dan harus mendukung terhadap kegiatan peningkatan pelayanan publik yang diaktualisasikan melalui kesadaran hukum.

Kepustakaan pelayanan umum seringkali dikaitkan dengan pelayanan yang disediakan untuk pelayanan umum. Istilah pelayanan sendiri mengandung makna, yaitu perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurus hal-hal yang diperlukan oleh masyarakat. Dengan kata lain, pelayanan umum itu sendiri bukanlah sasaran atau kegiatan, melainkan merupakan suatu proses untuk mencapai sasaran tertentu yang telah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

ditetapkan terlebih dahulu. Menurut Tjosvold sebagaimana dikutip dalam Sadu Wasistiono dikemukakan bahwa melayani masyarakat baik sebagai kewajiban maupun sebagai kehormatan merupakan dasar bagi terbentuknya masyarakat yang manusiawi.

Pelayanan publik dalam perkembangannya timbul dari adanya kewajiban sebagai sebuah proses penyelenggaraan kegiatan pemerintahan baik yang bersifat individual maupun kelompok. Dalam pemberian pelayanan tidak boleh tercipta perlakuan yang berbeda, sehingga menimbulkan diskriminasi pelayanan bagi masyarakat. Selain itu, manajemen pelayanan perlu pula mendapat pembenahan melalui keterbukaan dan kemudahan prosedur, penerapan tarif yang jelas dan terjangkau, keprofesionalan aparatur dalam teknik pelayanan, dan tersedianya tempat pengaduan keluhan masyarakat (public complain), serta tersedianya sistem pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur.

#### B. *Good Governance* dalam Persepektif Pelayanan di Indonesia

Tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukuan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka mencapai tujuan nasional tersebut, seluruh bangsa Indonesia, termasuk Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

negara mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan<sup>25</sup>.

Pentingnya penerapan good governance di beberapa negara sudah dimulai pada tahun 1980, dan di Indonesia good governance mulai dikenal secara lebih pada tahun 1990 sebagai wacana penting yang muncul dalam berbagai pembahasan, diskusi dan penelitian, baik dilingkungan pemerintah, swasta dan masyarakat termasuk lingkungan para akademisi. Sejak terjadinya krisis moneter dan krisis kepercayaan yang mengakibatkan perubahan dramatis pada tahun 1998, Indonesia telah memulai berbagai inisiatif yang dirancang untuk mempromosikan good governance, akuntabilitas dan partisipasi yang lebih luas dan partisipatoris di Indonesia. Good governance dipandang sebagai paradigma baru dan menjadi ciri yang perlu ada dalam sistem administrasi publik, Governance diartikan sebagai kualitas hubungan pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya.

Isu governance mulai memasuki area perdebatan di Indonesia didorong oleh adanya dinamika yang menuntut adanya perubahan, baik dilingkungan pemerintah, dunia usaha, maupun di masyarakat. Peran pemerintah sebagai pembangun maupun penyedia jasa pelayanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya Isu governance mulai memasuki area perdebatan di Indonesia didorong oleh adanya dinamika yang menuntut adanya perubahan, baik dilingkungan pemerintah, dunia usaha, maupun di

---

<sup>25</sup>Dwiyanto, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Yogyakarta: Gajah Mada University Press

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

masyarakat<sup>26</sup>. Peran pemerintah sebagai pembangun maupun penyedia jasa pelayanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya

Pengelola perubahan dibutuhkan upaya keras agar menjamin adanya komunikasi efektif antar agen perubahan dengan berbagai pihak lainnya dalam rangka mencairkan situasi status quo maupun mengkonsolidasikan perubahan. Mengelola perubahan adalah suatu proses untuk menghasilkan perubahan dengan tingkat resistensi yang minimal. Untuk itu, keterlibatan berbagai pihak yang terpengaruh harus dilakukan sejak awal. Keterlibatan bukan sekedar mereka diberitahu tentang adanya rencana untuk berubah, tetapi juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk mendefinisikan dan menentukan agenda perubahan dan secara penuh memberi komitmen untuk mengimplementasikan perubahan.

Upaya membangun masyarakat madani, partisipasi, dan good governance pada umumnya diterima sebagai bagian upaya dari demokratisasi. Dalam konsep governance ada tiga stakeholder utama yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing, yaitu negara dan pemerintah, swasta dan dunia usaha serta peran dari masyarakat. Institusi pemerintahan berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor dunia usaha menciptakan pekerjaan dan pendapatan, masyarakat berperan dalam membangun interaksi sosial, ekonomi dan politik.

---

<sup>26</sup>Sedamaryanti, Good Governance (Kepemimpinan Yang Baik) Dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik), Bandung: CV. Mandar Maju.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Di masa yang akan datang, kesadaran akan adanya keragaman stakeholder menjadi sangat penting untuk menjamin terciptanya good governance. Tantangan terbesar forum multi stakeholder adalah dapat menjamin kelompok yang telah termarginalisasi dalam proses pembangunan sosial-ekonomi yang ada untuk tetap terlibat, menjamin agar forum tidak didominasi oleh kelompok kecil, serta menjamin adanya proses yang adil dan seimbang dalam pengambilan keputusan publik. Unsur stakeholder lain yang penting dan perlu diperhatikan peran sertanya dalam mewujudkan good governance adalah sektor swasta, karena merupakan kelompok yang sama pentingnya dengan pemerintah dan masyarakat madani.

Lima upaya yang dikemukakan untuk menggambarkan sejauh mana perubahan menuju good governance adalah :

1. Upaya merampingkan organisasi dalam pemerintahan menuju kepada birokrasi yang lebih efisien.
2. Upaya memberikan insentif terhadap prestasi.
3. Upaya memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme
4. Upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.
5. Upaya mendorong partisipasi.

Kinerja pelayanan publik yang buruk merupakan hasil kompleksitas permasalahan yang ada ditubuh birokrasi. Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah digerakkan oleh peraturan dan anggaran dan bukan digerakkan oleh misi.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Good Governance dalam menjalankannya menggunakan beberapa azas yang perlu diperhatikan dalam penerapannya. Adapun azas tersebut diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Good governance merupakan konsep yang menghubungkan negara dengan penduduk, ketika suatu pelayanan publik disebuah negara berjalan dengan baik, maka sebenarnya yang mendapat manfaat bukan hanya sekedar penduduk, tetapi juga pemerintah. Menurut Syakrani dan Syahrani terdapat dua makna yang seharusnya terdapat dalam hubungan pemerintah yang baik (good governance) dengan pelayanan publik, pertama, keberfungsian pelayanan publik dapat menggambarkan: (1) Pemerintah mampu menyediakan pelayanan publik sesuai preferensi dan kebutuhan penduduk; (2) Pemerintah mampu menyelenggarakan fungsi ini dengan mutu yang prima.

Kedua, berfungsinya pelayanan publik juga memiliki implementasi jangka panjang dan luas, khususnya daya saing bangsa dan daerah. Salah satu yang mempengaruhi dan menyebabkan menurunnya daya saing daerah maupun bangsa adalah birokrasi pemerintah yang tidak efisien, yang berdampak pada biaya tinggi dalam berinvestasi.

Pelayanan publik selama ini menjadi ranah untuk berinteraksi langsung antara pemerintah dengan pihak non pemerintah, sehingga baik dan buruknya dalam pelayanan publik sangat dirasakan langsung oleh masyarakat yang dapat merasakan apabila terjadi perubahan-perubahan yang signifikan. Keberhasilan dalam mewujudkan praktik good governance dalam pelayanan publik mampu membangkitkan dukungan dan kepercayaan masyarakat.



### C. Peran Lembaga Negara dalam Fungsi Pelayanan Publik

Pengertian peranan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa atau seperangkat tingkah yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Teori peran adalah sebuah sudut pandang dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar aktivitas harian diperankan oleh kategori-kategori yang ditetapkan secara sosial (misalnya ibu, manajer, guru), setiap peran sosial merupakan serangkaian hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang yang harus dihadapi dan dipenuhi yang didasarkan pada pengamatan bahwa orang-orang bertindak dengan cara yang dapat diprediksikan, dan bahwa kelakuan seseorang bergantung pada konteksnya, berdasarkan posisi sosial dan faktor-faktor lain.

Peran pelayanan publik yang ideal pada dasarnya harus mampu memberikan pelayanan yang cepat, murah, mudah, berkeadilan, berkepastian hukum, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan perkembangan dinamika perkembangan masyarakat, namun demikian, kenyataannya masyarakat masih menghadapi kinerja dan pengelolaan pelayanan publik yang masih jauh dari optimal, yang antara lain disebabkan oleh sistem manajemen instansi pemerintahan yang belum efisien, praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, ketiadaan standar kualitas yang jelas untuk menjadi pedoman bagi instansi-instansi penyelenggara pelayanan publik, dan sebagainya, sehingga pelayanan publik pada umumnya lebih banyak menjadi sasaran kritik dan ketidakpuasan masyarakat penerima pelayanan yang sampe

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

batas batas tertentu menempatkan diri sebagai konsumen dari pelayanan publik itu.

Banyaknya pengaduan yang disampaikan melalui media massa atau langsung pada unit pelayanan yang bersangkutan yang menggambarkan ketidakpuasan warga masyarakat terhadap kualitas pelayanan dari berbagai instansi penyelenggara pelayanan publik. Keluhan tentang prosedur yang birokratif yang masih berbelit-belit dan berbiaya tinggi.

Pengambilan keputusan yang tidak transparan dan inkonsisten, sehingga masyarakat penerima pelayanan tidak memiliki kepastian mengenai hak-haknya. Kurangnya akses publik terhadap informasi mengenai hak dan kewajiban, baik pihak penyelenggara maupun penerima pelayanan, sehingga warga masyarakat tidak memiliki kepastian mengenai kedudukan hukumnya di dalam sistem pelayanan publik itu. Kualitas pelayanan masih rendah, baik dari segi tata cara pelayanan, kualitas produk yang dihasilkan, waktu penyelesaian pelayanan serta penetapan dan pengenaan mengenai biaya pelayanan. Baik buruknya pelayanan publik sangat bergantung pada kualitas individual pejabat-pejabat yang bertanggung jawab atas suatu jenis pelayanan tertentu.

Belum tumbuhnya mentalitas para petugas atau pejabat penyelenggara pelayanan publik sebagai public servant, dan sebaliknya masih kuatnya mentalitas para petugas atau pejabat sebagai pihak yang harus dilayani menimbulkan kecenderungan bahwa baik-buruknya pelayanan yang diberikan banyak tergantung pada keputusan diskresioner para pejabat itu.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keluhan atau pengaduan adalah upaya berdasarkan hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat apabila menerima pelayanan tidak prima dari penyelenggara pelayanan publik. Suatu pelayanan dapat diklasifikasi sebagai tidak prima apabila kualitas pelayanan tersebut tidak sesuai harapan dari masyarakat penerima pelayanan atau tidak memenuhi standar pelayanan minimal yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pelayanan keluhan publik sebenarnya merupakan konsekuensi atau akibat dari kualitas pelayanan publik yang tidak memenuhi standar minimal pelayanan. Oleh karena itu, sistem pelayanan keluhan publik mestinya menjadi bagian tidak terpisahkan dari sistem pelayanan publik.

Ditinjau dari perwujudan asas-asas pemerintahan yang baik berlaku juga atas suatu sistem dan mekanisme pelayanan keluhan publik dapat disimpulkan bahwa :

1. Asas keterbukaan dan asas akuntabilitas sudah agak eksplisit tercermin didalam aturan-aturan hukum yang berkenaan dengan pengelolaan keluhan publik. Eksistensi kedua asas ini dalam peraturan perundangundangan secara eksplisit menegaskan dasar legitimasi dari keberadaan suatu sistem dan mekanisme pengelolaan keluhan publik didalam sistem hukum, baik dalam lingkup nasional maupun sektoral.
2. Asas kepastian hukum dalam suatu sistem pengelolaan keluhan publik, pada dasarnya juga sudah dipenuhi didalam peraturan perundangundangan khususnya yang menyangkut :
3. Hak-hak masyarakat untuk melaksanakan kontrol sosial terhadap berjalanya fungsi pelayanan publik,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

4. Hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam penyelenggaraan negara,
5. Hak untuk memperoleh informasi dan menyampaikan pendapat,
6. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum.

Asas kepastian hukum ini belum tercermin dengan tegas dengan kaitan adanya jaminan tindak lanjut terhadap pengaduan yang sudah dimulai prosesnya sejak keluhan diajukan oleh masyarakat.

1. Asas profesionalitas diartikan sebagai pengutamaan pada keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **D. Hak Warga Negara untuk Memperoleh Pelayanan oleh Lembaga Negara.**

Perkembangan gagasan (asas) negara hukum sesungguhnya dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak individu.

Dari perspektif negara hukum diasumsikan sebagai peniungan perlindungan terhadap hak-hak individu yang dilakukan dengan cara membatasi kekuasaan pemerintah (penguasa), sedangkan dalam konteks pembatasan kekuasaan pemerintah (negara) dilakukan dengan tujuan untuk melindungi hak-hak individu yang dalam praktik penyelenggaraan negara dalam perspektif asas negara hukum modern (negara hukum kesejahteraan) yaitu tidak adanya kekuasaan negara yang boleh dibiarkan bebas tanpa pembatas dan pengawasan.

Hak untuk memperoleh pelayanan oleh lembaga negara merupakan salah satu hak sebagai warga negara. Dalam hal ini berkaitan dengan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pelayanan publik oleh pemerintah negara maupun daerah. Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ini sebagai awal yang penting dalam menyebarluaskan gagasan yang mengarah pada perbaikan pemerintahan.

Pelayanan publik oleh pemerintah negara indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan PerundangUndangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undangundang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Pelayanan publik dilaksanakan oleh suatu satuan kerja atau organisasi yang berada di suatu institusi penyelenggara negara. Pelaksana pelayanan publik terdiri dari pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

Sedangkan untuk pemerintah daerah, perwujudan hukum tersebut tertuang dalam Peraturan –Peraturan Daerah (PERDA) yang dalam hal ini

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

terdapat PERDA tentang Pelayanan Publik dan PERDA tentang Keterbukaan Informasi Publik. Akan tetapi dalam pelaksanaannya diperlukan pandangan atau paradigma agar dapat terjalin kesinambungan dan timbal balik yang sesuai antara suatu lembaga negara baik pemerintah maupun daerah dengan masyarakat. Terdapat beberapa konsep paradigma dalam pemerintahan, diantaranya adalah SDER (Sustainable, Development, and Engginering Regulation). Menurut Jazim Hamidi (2011), penerapan konsep SDER telah berhasil menggeser paradigma pembentukan PERDA yang bercorak state oriented maupun civilized oriented menjadi paradigma yang terintegrasi yaitu: state and civilized integrated oriented. Implikasi hukumnya adalah Program Legislasi Daerah harus diorientasikan dapat memperjuangkan reformasi regulasi lokal untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Pelayanan publik erat hubungannya dengan pemerintah daerah. Salah satu pelayanan publik yaitu adanya retribusi dan perizinan. Fungsi utama perlunya diadakan kegiatan retribusi perizinan adalah pemerintah dapat mengadakan pembinaan, pengaturan, dan pengendalian serta pengawasan pada pihak-pihak tertentu yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang publik, penggunaan sumber daya alam, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan. Proses perolehan izin tersebut dilakukan oleh lembaga negara baik dari BUMN atau BUMD yang saling berkesinambungan dalam pelaksanaannya agar tercipta pelayanan publik yang efektif dan bermutu baik. Sedangkan dalam konteks lembaga daerah, Perolehan hak pelayanan publik bagi masyarakat dilakukan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

oleh BUMD, di Kabupaten Kendal dalam bidang perizinan dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT).

## **E. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPTS) dan Negara Demokrasi**

Negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Tiap-tiap warga mempunyai hak dan kedudukan yang sama, begitu juga dalam haknya memperoleh pelayanan publik.

Sistem politik demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi oleh rakyat dalam pemilihan berkala. Wakil-wakil tersebut berperan dalam menentukan jalannya negara sebagai organisasi tertinggi. Di Indonesia organisasi tertinggi adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang di dampingi oleh lembaga tinggi lain serta lembaga daerah dalam melaksanakan berbagai hak dan kewajibannya.

Salah satu kewajiban lembaga daerah yaitu menjalankan otonomi daerah, sejak 1 Januari 2001 daerah dikehendaki untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan dan pembangunan. Hal tersebut diatur dalam UU tentang Pemerintahan Daerah dan juga UU tentang Perundangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah berbagai sumber pendapatan asli daerah (PAD).

### **F. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Dalam Perspektif Perizinan.**

Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi setiap kebutuhan warga negara melalui sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan perizinan yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas pelayanan perizinan.

Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan perizinan masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan diberbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi dan perdagangan.

Pelayanan perizinan sebagai salah satu fungsi utama pemerintah adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat atas pengadaan barang dan jasa yang diperlukan masyarakat. Pemenuhan kepentingan dan kebutuhan masyarakat sangat menentukan bagi kelangsungan dan tegaknya sistem



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pemerintahan. Undang-Undang 1945 mengamanatkan kewajiban pemerintah untuk memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, yaitu membangun negara kesejahteraan dan tanggung jawab pemerintah memenuhi kebutuhan warga negara.

Pelayanan perizinan menjadi penting untuk dikedepankan antara lain, disebabkan oleh pertama, penyediaan jasa pelayanan perizinan oleh pemerintah yang memiliki dasar hukum yang jelas dalam penyelenggaraan dan memiliki konfigurasi indikator lega dan kelugasan. Kedua, meningkatkan kerja profesional pejabat negara dan pegawai negeri sipil lainnya, telah tersedia berbagai perangkat hukum lunak seperti kode etik dan tata tertib lainnya. Kedua perangkat tersebut belum berfungsi pada tataran memperkuat peran negara dan kurang berorientasi pada terciptanya peningkatan dan akuntabilitas aparatur dalam pelayanan perizinan.

Diperlukan peraturan perundang-undangan dibidang pelayanan perizinan karena Undang-undang Dasar 1945 sebagai perwujudan kedaulatan rakyat bertujuan meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Dengan demikian, bukan saja tugas, fungsi dan kewenangan serta tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan akan semakin meningkat, melainkan juga diharapkan mampu membantu terciptanya pemerintahan yang baik. Dengan terwujudnya peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan perizinan menimbulkan kepastian bagi setiap aparat pemerintah untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing.

## G. Undang-Undang tentang UMKM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki beberapa point aturan yang berkaitan erat dengan implementasi Keuangan Berkelanjutan di Indonesia. beberapa point aturan tersebut terdiri atas pasal-pasal berikut ini:

1. Bab II Asas dan Tujuan Pasal 2 mengatur bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berasaskan berwawasan lingkungan. Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
2. Bab VI Pasal 20 mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dengan cara memberikan insentif bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengembangkan teknologi dan kelestarian lingkungan hidup.
3. Bab VII Pembiayaan dan Penjaminan Pasal 22 menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah melakukan upaya: Pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank; Pengembangan lembaga modal ventura; Pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;<sup>27</sup>

<sup>27</sup>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.

## H. Peraturan Pemerintah

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 3 Februari 2021. PP Nomor 7/2021 ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Secara keseluruhan, PP berisi 10 Bab yang terdiri dari 143 Pasal.

Dengan ditetapkannya PP ini, pemberian kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi dan UKM dapat lebih optimal, komprehensif dan dapat terkoordinasi dengan baik," kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim, pada acara percepatan implementasi UU Cipta Kerja (PP No.7 tentang Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan Koperasi dan UMKM), di Gedung Pendopo Kabupaten Garut, Jawa Barat, Jumat (21/5).

PP diharapkan mendorong koperasi dan UMKM dapat tangguh dan kuat serta dapat menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. "Koperasi dan UMKM dalam UU Cipta Kerja mendapatkan perhatian khusus. Sehingga, diharapkan mereka dapat menjalankan usahanya dengan kepastian dan dapat bertumbuh menjadi usaha yang tangguh.

Setelah PP tersebut disahkan, Kementerian Koperasi dan UKM berkewajiban untuk mensosialisasikan PP tersebut kepada berbagai pihak.

"Tujuan sosialisasi, agar berbagai aturan yang dimuat dalam PP dapat dimanfaatkan dengan optimal, baik oleh koperasi dan UMKM,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, serta Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM<sup>28</sup>.

**I. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan**

Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di dalam pasal 9 di jelaskan bahwa :

1. Permohonan perizinan dan non perizinan di ajukan kepada penyelenggara yaitu DPMPTSP.
2. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan dokumen persyaratan yang lengkap dan sah.  
Dan di dalam peraturan ini juga di jhelaskan secara umum gambaran tata cara mengurus perizinan.
3. Tata cara pelayanan perizinan dan non perizinan secara umum dilakukan secara berikut :
  - a. Pemohon mengambil formulir dan mendapatkan informasi mengenai persyaratan dan prosedur pelayanan;
  - b. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi dokumen persyaratan;
  - c. Formulir permohonan dan kelengkapan persyaratan disampaikan kepada petugas front office/petugas pendaftaran;
  - d. Petugas front office/petugas pendaftaran memeriksa formulir permohonan dan kelengkap[an persyaratan dengan ketentuan apabila :

<sup>28</sup>Perstursn Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Berkas lengkap, petugas memberikan tanda terima berkas dan melakukan registrasi permohonan; dan
  - 2) Berkas tidak lengkap, maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
- e. Berkas yang telah didaftarkan diteruskan kepada back office untuk dilakukan penelitian dan pemeriksaan lebih lanjut, dengan ketentuan apabila :
- 1) Berkas memenuhi persyaratan, untuk jenis perizinan dan non perizinan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan/pengujian fisik oleh tim kerja teknis, maka pemohon dapat diproses lebih lanjut oleh back office;
  - 2) Berkas memenuhi persyaratan, untuk jenis perizinan dan non perizinan yang memerlukan pemeriksaan lapangan/pengujian fisik maka dilakukan kegiatan pemeriksaan lapangan/pemeriksaan fisik oleh tim kerja teknis; dan
  - 3) Berkas tidak memenuhi persyaratan, maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dan dilakukan perbaikan.
- f. Tim kerja teknis yang melakukan pemeriksaan lapangan/pengujian fisik terhadap permohonan yang memerlukan tindakan tersebut, menuangkan hasil pemeriksaan dalam berita acara pemeriksaan;
- g. Tim kerja teknis berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan/pengujian fisik menyampaikan rekomendasi/advis kepada kepala DPMPTSP;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Apabila berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kelengkapan persyaratan dokumen perizinan serta hasil pemeriksaan memenuhi persyaratan, maka permohonan ditolak dengan surat kepala DPMPTSP;
- i. Berkas yang telah dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan untuk jenis perizinan dan non perizinan dapat ditindak lanjuti dengan :
  - 1) Pencetakan dokumen perizinan dan non perizinan;
  - 2) Pembubuhan paraf pejabat yang berwenang secara berjenjang; dan
  - 3) Penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan oleh kepala DPMPTSP;
- j. Dokumen perizinan dan non perizinan yang telah ditanda tangani oleh kepala DPMPTSP direguistrasi dan diserahkan kepada pemohon;
- k. Pemohon mengambil dokumen perizinan dan non perizinan dengan menyerahkan tanda terima permohonan kepada petugas pendaftaran/front office<sup>29</sup>.

#### J. Perbedaan Usaha Kecil dan Usaha kecil Mikro.

Pada dasarnya, UKM merupakan singkatan dari Usaha Kecil dan Menengah. Istilah UKM seringkali digunakan untuk menjelaskan unit usaha kecil dan menengah. Sementara itu, UMKM atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lebih sering menitikberatkan pada cakupan unit usaha mikro. Keduanya memiliki definisi yang berbeda-beda menurut berbagai

<sup>29</sup> Peraturan bupati pelalawan nomor 26 tahun 2020.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

literatur. Namun, sebagian besar literatur dan peraturan pemerintah lebih sering menggunakan istilah UMKM karena dianggap lebih mewakili ketiga unit usaha yang mencakup di dalamnya. Berbagai peraturan juga lebih menekankan pada penjelasan soal perbedaan tiga unit usaha, yakni unit usaha mikro, unit usaha kecil, dan unit usaha menengah. Dari sisi pembinaan dan pemberdayaan, ketiga unit usaha dikelola oleh pihak berbeda. Menurut aturan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, unit usaha mikro dibina oleh kabupaten dan kota, usaha kecil diurus oleh provinsi, sedangkan usaha menengah berskala nasional. Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM mengelompokkan jenis UMKM berdasarkan kriteria aset dan omzet.<sup>30</sup>

<sup>30</sup><https://www.jurnal.id/id/blog/kenali-kriteria-umkm-dari-4-perspektif/#:~:text=Usaha%20kecil%20merupakan%20entitas%20usaha,sendiri%20dalam%20mendefinisikan%20unit%20UMKM.>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Perizinan UMKM (usaha menengah kecil mikro) berdasarkan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Pelalawan

DPMPTSP dapat menyelenggarakan Perizinan setelah memenuhi sejumlah persyaratan yaitu persyaratan substantif, administratif, dan teknis. Bila ketiga syarat itu dipenuhi, maka itu dapat menyelenggara Perizinan, diantaranya :

- a. Persyaratan Substantif
- b. Persyaratan Administratif
- c. Persyaratan Teknis

Pejabat Penyelenggara Perizinan usaha diantaranya :

- a. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
- b. Kasi Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A selaku Pengurus Perizinan Usaha Menengah Kecil Mikro,
- c. Staf Kasi pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang berkaitan tentang pengurusan izin usaha.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Perizinan Bagi Usaha UMKM (usaha menengah kecil mikro) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Pelalawan ini ada beberapa indikator yang menjadi penghambat yang akan penulis uraikan sebagaimana dibawah ini:

- a. Kelengkapan Persyaratan
- b. Prosedur Pelayanan
- c. Waktu Penyelesaian
- d. Biaya Pelayanan

Pelayanan Adminitrasi Perizinan UMKM (usaha menengah kecil mikro) di kabupaten Pelalawan belum berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya beberapa keluhan dari masyarakat yang sedang mengurus surat izin usaha UMKM (usaha menengah kecil mikro) yang masih kurang dari segi informasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan dan juga mengenai waktu penyelesaian surat izin usaha.

Berdasarkan observasi dan hasil wawancara ke berbagai informen maka ditemukan kendala-kendala dalam Pelayanan Adminitrasi izin usaha UMKM (usaha menengah kecil mikro) yakni :

*Pertama*, Tidak adanya papan informasi yang dapat memudahkan masyarakat untuk mengetahui prosedur dan persyaratan pengurusan surat izin usaha.

*Kedua*, Pelayanan pengurusan surat kadang-kadang memerlukan waktu yang lama karena Kepala Dinas yang menandatangani surat izin

usaha tersebut tidak berada ditempat sedangkan tidak ada kebijakan untuk melimpahkan kewenangan tersebut kepada Sekretaris.

*Ketiga*, kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan Surat Izin Usaha, padahal ini adalah sesuatu yang diharuskan.

## B. Saran

Berdasarkan uraian yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan beberapa saran untuk menjadi pertimbangan kedepannya, Adapun saran yang dapat dijadikan masukan dalam Pelaksanaan Perizinan Usaha UMKM atau Usaha Kecil yakni :

1. Masyarakat harus lebih cerdas dalam mencari informasi mengenai biaya, waktu prosedur serta persyaratan pelayanan, agar tidak ada celah bagi oknum petugas pelayanan untuk memungut biaya yang tidak resmi.
2. Pemerintah dalam hal ini Bupati Pelalawan harus membuat suatu kebijakan mengenai pelimpahan kewenangan dalam menandatangani surat izin usaha kepada Sekretaris agar pelayanan tidak terhambat.
3. Adanya tindakan tegas dari Pihak yang berwenang kepada masyarakat yang tidak mengurus izin dalam hal apapun.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Press, 2015).
- Deribson Siagia Sugiarto, Metode Statiska, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2006).
- Haris Herdiansyah, Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial, (Jakarta, Selemba Humanika, 2010).
- Hajar. M, Metode Penelitian Hukum, (Fakultas Syariah dan Hukum Uin Suska Riau, 2011).
- Hasanah, Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial), (Jakarta : At-Taquaddum 8 (1).
- Jonaidi Efendi dkk, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Jakarta prenademedia Grop, 2018), cetakan 2.
- Rony Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2012).
- Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafik, 2014).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan, Statistik Daerah kabupaten Pelalawan Tahun 2016, Op. Cit, h. 1.
- Hidayat, Akulturasi Islam dan Budaya Melayu Studi Tentang Ritus Siklus Kehidupan Orang Melayu Di Pelalawan provinsi Riau, ( Jakarta : Badan Litbanh dan Diklat Departemen Agama RI,2009) Cet.I,h.39

### JURNAL

- Dyah Ikhsanti, '4 Manfaat Utama Jika Usaha Anda Memiliki Surat Izin yang Sah'(Atur Duit, 6 Maret 2019) diakses pada 22Oktober 2019. Paskalia, 'Simak Perizinan Bagi UMKM!'(Modal Rakyat, 1 Juli 2019) diakses pada 22 Oktober 2019.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Paskalia,'Simak Perizinan Bagi UMKM'(Modal Rakyat, 1Juli 2019)<<https://www.modalrakyat.id/blog/simak-perizinan-bagi-umkm-->. diakses pada 22 oktober 2019.

<https://www.dpmpstsp.pelalawankab.go.id/standar-pelayanan.html>

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang paket Perbaikan Investasi. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Pasal 1 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Daerah Kabupaten pelalawan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perizinan.

Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Bupati Kabupaten Pelalawan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang menandatangani perizinan dan non perizinan serta penyelenggaraan pelayanan kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul *"PELAKSANAAN PERIZINAN BAGI USAHA UMKM (usaha menengah kecil mikro) BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI KABUPATEN PELALAWAN"* yang ditulis oleh :

Nama : **NOLA ARULIA ANGRIANI**  
 NIM : 11727201977  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Telah dimunaqasahkan pada :  
 Hari / Tanggal : Senin, 22 November 2021  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Gedung Belajar Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 November 2021 M  
**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
**ASRIL,S.H.I.,M.H**

Sekretaris  
**MUSLIM,S.Ag.,SH.,M.Hum.**

Penguji I  
**MHD. KASTULANI,S.H.,M.H**

Penguji II  
**NURAINI SAHU,Hj.,S.H,M.H**

Mengetahui:  
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalikus, S.Ag.**  
 NIP. 19750801 200701 1 023



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul Pelaksanaan Perizinan Bagi Usaha UMKM (Usaha Menengah Kecil Mikro) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Di Kabupaten Pelalawan ditulis oleh saudara :

Nama : Nola Arulia Angriani  
NIM : 11727201977  
Program Studi : Ilmu Hukum

Diseminarkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa/23 Maret 2021  
Narasumber : Musrifah, SH, MH

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Pekanbaru, 30 Maret 2021  
Narasumber

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023

Musrifah, SH, MH

NIP. 130217039

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dianggap melanggar Undang-Undang Hak Cipta milik UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU





## PEMERINTAH PROVINSI RIAU

### DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/40381  
T E N T A N G



#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3224/2021 Tanggal 30 Maret 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama              | : | <b>NOLA ARULIA ANGRANI</b>                                                                                                                                                          |
| 2. NIM / KTP         | : | <b>11727201977</b>                                                                                                                                                                  |
| 3. Program Studi     | : | <b>ILMU HUKUM</b>                                                                                                                                                                   |
| 4. Jenjang           | : | <b>S1</b>                                                                                                                                                                           |
| 5. Alamat            | : | <b>PEKANBARU</b>                                                                                                                                                                    |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>PELAKSANAAN PERIZINAN BAGI USAHA UMKM (USAHA MENENGAH KECIL MIKRO ) BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI KABUPATEN PELALAWAN</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOMPLEK PERKANTORAN BHAKTI PRAJA KABUPATEN PELALAWAN</b>                                                                  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 1 April 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU**

#### Tembusan :

#### Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Pelalawan
3. Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pangkalankerinci
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, dan penyusunan sumber:

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : dpmptsp.pelalawan@gmail.com  
Telp/Fax : 0761-95992. Telp : 0761-95991  
PANGKALAN KERINCI

**REKOMENDASI**

Nomor : 504/DPMTSP/2021/0068

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET**  
**DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN PENELITIAN**

Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan serta Penyelenggaraan Pelayanan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan dan Surat dari DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/40381 dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

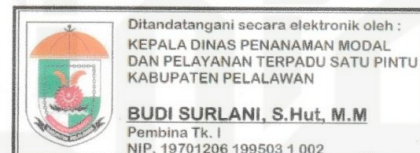
1. Nama : **NOLA ARULIA ANGRIANI**
2. NIM / KTP : 11727201977
3. Program Studi : ILMU HUKUM
4. Jenjang : S1
5. Alamat : JL. AMBISI
6. Judul Penelitian : PELAKSANAAN PERIZINAN BAGI USAHA UMKM (USAHA MENENGAH KECIL MIKRO) BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI KABUPATEN PELALAWAN
7. Lokasi Penelitian : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOMPLEK PERKANTORAN BHAKTI PRAJA KABUPATEN PELALAWAN

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan Riset / Pra Riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Pangkalan Kerinci  
Pada tanggal 5 April 2021



**Tembusan :**

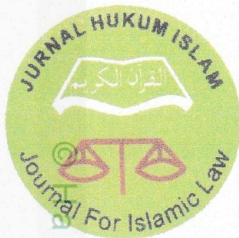
1. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Komplek Perkantoran Bhakti Praja Kabupaten Pelalawan
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pelalawan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara
- Berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008, Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**





# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**NAMA : NOLA ARULIA ANGRIANI**

**NIM : 11727201977**

**JURUSAN : ILMU HUKUM**

**JUDUL : PELAKSANAAN PERIZINAN BAGI USAHA UMKM (USAHA MENENGAH KECIL MIKRO) BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PERIZINAN DI KABUPATEN PELALAWAN**

**Pembimbing: Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum.**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 21 Desember 2021

Pimpinan Redaksi



**Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.**

**NIP. 19880430 201903 1 010**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

**NOLA ARULIA ANGRIANI**, dilahirkan di Pangkalan Kerinci pada tanggal 17 November 1999. Anak pertama dari empat bersaudara. Buah kasih dari pasangan Ibunda Jamila dan Ayahanda Sarno. penulis memulai Pendidikan Dasar di SDN 007 Pangkalan Kerinci dan selesai pada tahun 2010/2011. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Madrasah Tsanawiyah di MTSN Pangkalan Kerinci dan selesai pada tahun 2013\2014. Melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci dan selesai pada tahun 2016/2017.

Setelah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas dan di tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum dan memilih konsentrasi Hukum tata Negara .

Atas izin Allah SWT dan usaha dari penulis, serta doa dari orang tua, keluarga dan teman-teman penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Pelaksanaan Perizinan Bagi Usaha UMKM ( usaha menengah kecil mikro) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Pelalawan” pada tanggal 22 November 2021 penulis dinyatakan “LULUS” dan menyandang Gelar Sarjana Hukum(SH) di Uin Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.